



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYAMSUDDIN
2. Jabatan : KEPALA BALAI BESAR
3. NHK : 497167

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.494.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 154 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASAR BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 154.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 154 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASAR BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/45 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
4. Tanah Seluas 340 m2 di KAB / KOTA MAMUJU, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 12 m2/20 m2 di KAB / KOTA MAMUJU, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
6. Tanah Seluas 21.500 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **320.000.000**

1. MOBIL, HONDA HONDA FREED Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
2. MOBIL, TOYOTA YARIS SEDAN Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **----**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **277.421.816**



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. 175.000.000

Rp. 3.266.421.816

III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.266.421.816

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AHMADI
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
3. NHK : 791754

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	4.000.000
1. MOTOR, HONDA METIK Tahun 2018, HASIL SENDIRI	Rp.	
4.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	19.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.052.472
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	26.552.472

III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	26.552.472

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUMUH MUHARAM
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 792917

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	40.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA SUKABUMI , HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	52.000.000
1. MOTOR, YAMAHA MIO M3 MATIC Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000		
2. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	7.416.322
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	99.416.322
III. HUTANG	Rp.	218.541.729
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	-119.125.407

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FINA ARPAH
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 859704

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 10.855.010.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/220 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 855.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 981 m2/2.500 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA , HIBAH TANPA AKTA Rp. 10.000.010.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 194.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOBIL, HONDA HONDA HR-V Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 5.949.316

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 11.054.959.316

III. HUTANG Rp. 376.920.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 10.678.039.316

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ASEP ILHAM
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
3. NHK : 794238

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.223.750.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 42 m2/60 m2 di KAB / KOTA TASIKMALAYA, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah Seluas 392 m2 di KAB / KOTA TASIKMALAYA, HASIL SENDIRI Rp. 238.000.000
3. Tanah Seluas 3.645 m2 di KAB / KOTA TASIKMALAYA, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
4. Tanah Seluas 1.260 m2 di KAB / KOTA TASIKMALAYA, HASIL SENDIRI Rp. 58.500.000
5. Tanah Seluas 980 m2 di KAB / KOTA TASIKMALAYA, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
6. Tanah Seluas 568 m2 di KAB / KOTA TASIKMALAYA, HASIL SENDIRI Rp. 8.200.000
7. Tanah Seluas 140 m2 di KAB / KOTA TASIKMALAYA, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
8. Tanah Seluas 1.050 m2 di KAB / KOTA TASIKMALAYA, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
9. Tanah Seluas 1.022 m2 di KAB / KOTA TASIKMALAYA, HASIL SENDIRI Rp. 14.600.000
10. Tanah Seluas 658 m2 di KAB / KOTA TASIKMALAYA, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
11. Tanah Seluas 700 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA ,



HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

12. Tanah dan Bangunan Seluas 95 m2/76 m2 di KAB / KOTA

TASIKMALAYA, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

13. Tanah Seluas 3.500 m2 di KAB / KOTA TASIKMALAYA, HASIL

SENDIRI Rp. 43.750.000

14. Tanah Seluas 980 m2 di KAB / KOTA TASIKMALAYA, HASIL

SENDIRI Rp. 6.300.000

15. Tanah Seluas 1.050 m2 di KAB / KOTA TASIKMALAYA, HASIL

SENDIRI Rp. 30.000.000

16. Tanah Seluas 2.324 m2 di KAB / KOTA TASIKMALAYA, HASIL

SENDIRI Rp. 49.800.000

17. Tanah Seluas 224 m2 di KAB / KOTA TASIKMALAYA, HASIL

SENDIRI Rp. 2.000.000

18. Tanah Seluas 280 m2 di KAB / KOTA TASIKMALAYA, HASIL

SENDIRI Rp. 2.600.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

53.350.000

1. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA/MINIBUS Tahun 2010, HASIL

SENDIRI Rp. 50.000.000

2. MOTOR, HONDA VARIO/MATIC Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.

1.250.000

3. MOTOR, YAMAHA MIO M3/MATIC Tahun 2017, HASIL SENDIRI

Rp. 2.100.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp.

22.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp.

256.658.465

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp.

3.549.090

F. HARTA LAINNYA

Rp.

146.983.287

Sub Total

Rp.

1.706.290.842

III. HUTANG

Rp.

522.150.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.184.140.842

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : GITA NURDINIATI
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
3. NHK : 884058

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	750.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/120 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	220.000.000
1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	29.816.991
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	999.816.991
III. HUTANG	Rp.	68.400.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	931.416.991

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.